

Temuan DPRD Sintang Rp8 Miliar

Pontianak, BERKAT.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rizal Djalil, mengungkapkan temuan BPK di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang periode 2004 – 2009 sebesar Rp8 miliar berpotensi keuangan negara. Temuan tersebut berkaitan dengan perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.



RIZAL DJALIL

“Harus segera diselesaikan kewajiban dan harus segera ditindaklanjuti oleh anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2004 – 2009,” katanya usai pertemuan dan dialog bersama di BPK RI Perwakilan Kalbar, Kamis (7/4).

Selain periode 2004-2009, BPK juga mene-

mukan beberapa temuan yang berpotensi kerugian negara untuk anggota DPRD Sintang periode 2009-2014. Namun, lanjut Rizal Djalil, jumlahnya masih relatif kecil.

“Sekitar Rp300 juta,” katanya.

Temuan tersebut harus diselesaikan dan ditindaklanjuti, baik bagi anggota dewan yang duduk kembali di legislatif maupun yang tidak. Sedangkan jika ada yang sudah meninggal, kata Rizal Djalil,

akan ada pertimbangan lain.

Di Kalbar, BPK menilai ada dua kabupaten yang sudah baik tata kelola keuangannya yakni Kabupaten Sintang dan Kabupaten Pontianak.

Dua kabupaten tersebut satu langkah lagi akan mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangannya dan pada pertemuan ini, BPK RI sangat mendukung upaya Kabupaten

LANJUTAN BACA HAL 11

Temuan DPRD Sintang Rp8 Miliardari Hal 1

Sintang agar laporan keuangan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Rizal Djalil juga mengakui bahwa Kabupaten Sintang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimana banyaknya perbankan yang tumbuh di kabupaten tersebut. Banyaknya perbankan, menunjukkan aliran dana yang cukup besar di Kabupaten Sintang.

“Kita BPK, ingin sedini mungkin agar pengelolaan keuangannya juga baik,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Sintang Milton Crosby menegaskan pemerintah daerah tetap akan mengikuti prosedur pemeriksa-

an yang berlaku.

“Ya kami akan ikuti sesuai prosedur,” jelasnya.

Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2004 - 2009, Tony mengaku baru mengetahui potensi kerugian negara selama tenggang waktu tersebut. Ia juga telah mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif senilai Rp64,5 juta.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sintang ini mengakui tidak mengetahui bahwa ada dan terjadi temuan sebesar Rp8 miliar tersebut. Namun, ia siap mengembalikan kalau memang menjadi temuan BPK. (nia)